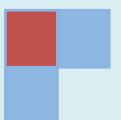


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2021
SEMESTER I**

DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

Jl. Dermaga No 08 Purnama – Dumai Barat

Telp. (0765) 430049



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah S.W.T Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perikanan Kota Dumai dapat terselesaikan dengan baik. LKj IP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan media akuntabilitas kinerja dan alat umpan balik pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi terwujudnya *good governance*, maka Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban juga untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) semester pertama pada tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tersebut dimaksudkan sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai selama semester pertama di tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perikanan Kota Dumai semester pertama di tahun 2021 menginformasikan pencapaian kinerja *output* kegiatan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja *output* tersebut. Disamping itu di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga diungkapkan sumbangan (andil) pencapaian indikator *outcome* yang dapat diukur di Dinas Perikanan Kota Dumai pada saat ini, berdasarkan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki secara transparan dan akuntabel semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perikanan Kota Dumai semester pertama di tahun 2021 ini menjadi bagian dari kecukupan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai, serta bermanfaat bagi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam rangka meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj IP) Dinas Perikanan Kota Dumai semester pertama tahun 2021 diucapkan terima kasih.

Dumai, Juli 2021

Pt. Kepala Dinas Perikanan
Kota Dumai,



MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, MT
Pembina
NIP. 19750313 199403 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perikanan Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kelautan dan perikanan.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan salahsatu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada tabel 1.1 berikut ini:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan nilai tambah hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan2. Masih rendahnya produktivitas tangkap	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan2. Masih kurang jumlah, dan ketrampilan tenaga pendamping.3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah legalitas.4. Kurangnya Aparatur yang memiliki Sertifikasi Penyuluh, Pengawas atau Penyidik.

	<p>3. Masih rendahnya produktivitas budidaya</p> <p>4. Memfasilitasi bantuan untuk disalurkan kepada pembudidaya ikan, pengolahan ikan dan nelayan</p> <p>5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembinaan urusan bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>5. Belum sepenuhnya fasilitas sarana dan prasarana mendukung naiknya nilai produksi.</p> <p>6. Rendahnya partisipasi kelompok terhadap program yang dikembangkan.</p> <p>7. Masih rendahnya pemanfaatan regulasi, metode dan aturan yang mendukung produksi dan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.</p> <p>8. Masih kurangan dukungan sumberdaya manusia secara jumlah maupun ketrampilan.</p> <p>9. Dukungan dana APBD Kota, Tk II ataupun APBN.</p> <p>10. Kurangnya SOP dan legalitas pemanfaatan aset</p> <p>11. Belum Optimalnya koordinasi lintas sektoral.</p> <p>12. Rendahnya koordinasi dan keterkaitan program kegiatan Kab/Kota dengan Provinsi dan Kementerian;</p> <p>13. Rendahnya konsistensi kestabilan kontribusi dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten / Kota;</p> <p>14. Rendahnya dinamika investasi PMA pada bidang usaha perikanan.</p> <p>15. Rendahnya atau lemahnya koordinasi pemanfaatan CSR perusahaan setempat karena kurangnya nilai kepercayaan perusahaan</p> <p>16. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pasokan ikan konsumsi yang berasal dari luar;</p> <p>17. Belum adanya partisipasi pembentukan kelompok dari perusahaan setempat.</p> <p>18. Relatif rendahnya integritas moral dan etos kerja kelompok sasaran</p> <p>19. Rendahnya koordinasi peran pemerintah dalam pengelolaan harga produk hasil perikanan;</p> <p>20. Rendahnya motivasi pengembangan usaha budidaya akibat harga pakan (pellet) tinggi;</p> <p>21. Sulitnya memenuhi bahan baku sehingga produk hasil perikanan tidak kontinyu di pasaran.</p>
--	---	---

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ir. AFIFUDDINSYAH, MT Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai
Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : H. PAISAL, SKM, MARS Jabatan : Walikota Dumai Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Didalam perjanjian kinerja Kepala OPD Inspektorat Daerah Kota Dumai dengan pencapaian Target Kinerja :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1.281,84 ton dan tankap sebesar 1.521,86 ton	- Produksi perikanan tangkap - Produksi perikanan budidaya - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbina - Jumlah kelompok nelayan yang terbina	Ton Ton Kelompok Kelompok	334,77 292,18 40 37
2	Pencapaian target nilai konsumsi ikan	Nilai Konsumsi Ikan	Kg/kapita/th	103,27

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai dan sesuai Indikator Kinerja Utama, antara Lain :

No	Sasaran OPD	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1.281,84 ton dan tangkap sebesar 1.521,86 ton	Program pengelolaan budidaya perikanan	734.912.250
		<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	712.332.250
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	712.332.250
		<i>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	16.500.000
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.500.000
		<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	6.080.000
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.080.000
		Program pengelolaan perikanan tangkap	62.100.000
		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	62.100.000
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	62.100.000
2	Pencapaian target nilai konsumsi ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	499.862.985
		<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>	499.862.985
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	499.862.985

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi Hasil RKP Tahun 2021
TRIWULAN II
Dinas Perikanan Kota Dumai
Tabel 3.1.1

A. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)		Keterangan
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.019.161.205										2.029.325.769		40,43%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	57.436.500	-		50						50	2.670.000	50,00%	4,65%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, penganggaran dan laporan kinerja yang tersusun (Dokumen)	8	57.436.500	-	750.000	4	1.920.000					4	2.670.000	50,00%	4,65%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (7 Dokumen)	7	3.601.446.440	-		3						3	1.529.418.987	42,86%	42,47%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	3.601.446.440	-	638.249.534	6	891.169.453					6	1.529.418.987	50,00%	42,47%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*) (%)	100	83.363.347	-		50						50	13.669.000	50,00%	16,40%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*) (dokumen)	1	83.363.347	-		-	13.669.000					-	13.669.000	0,00%	16,40%	
			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Bulan)	12		-		6						6		50,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	100	219.771.912	-		50						50	58.927.600	50,00%	26,81%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik 3 unit kerja (Bulan)	12	5.669.605	-	1.800.000	6						6	1.800.000	50,00%	31,75%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12		-		6						6		50,00%		
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor (Bulan)	12	50.970.150	-		6						6		50,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik kantor pada 3 unit kerja (Bulan)	12		-	1.696.000	6	1.354.000					6		50,00%		
			Tersedianya makan minum pada 3 unit kerja (Bulan)	12	13.212.000	-		6						6	3.050.000	50,00%	23,09%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan (Bulan)	12	7.344.157	-	1.970.000	6	1.280.000					6	3.250.000	50,00%	44,25%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terperuhnya bahan bacaan lainnya (Bulan)	12	6.900.000	-	600.000	6	2.400.000					6	3.000.000	50,00%	43,48%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah dan kabupaten dalam riau (Bulan)	12	135.676.000	-	6.452.700	6	41.374.900					6	47.827.600	50,00%	35,25%	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	100	914.165.796	-	50					50	406.715.182	50,00%	44,49%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor (surat)	1000	300.000	-	100.000	400	100.000			400	200.000	40,00%	66,67%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	89.800.000	-	26.909.524	6	36.546.658			6	63.456.182	50,00%	70,66%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, jasa kantor, tenaga operator komputer, jasa pelayanan umum, tenaga keamanan dan supir (Bulan)	12	824.065.796	-	71.294.000	6	271.765.000			6	343.059.000	50,00%	41,63%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	142.977.210	-		50				50	17.925.000	50,00%	12,54%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	14	142.977.210	3	3.200.000	2	14.725.000			5	17.925.000	35,71%	12,54%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	48,76%	40,43%
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			62.100.000									-	0,00%
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			62.100.000									-	0,00%
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Operasional pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil (Kelompok)	18	62.100.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			734.912.250								4.192.450		0,57%
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pembinaan kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	60	712.332.250	-		25				25	4.192.450	41,67%	0,59%
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan sarana pendukung pendamping (Unit)	7	712.332.250	-	4.192.450	-	-			-	4.192.450	0,00%	0,59%
			Terlaksananya Operasional (Kali)	36		-		9				9		25,00%	
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (laporan)	1	16.500.000	-		-				-	-	0,00%	0,00%
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan kelompok pembudidayaan ikan (Bulan)	12	16.500.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			6.080.000									-	0,00%
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun (Kali)	30	6.080.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah

		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			499.862.985									1.645.000		0,33%	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	7	499.862.985	-		3					3	1.645.000	42,86%	0,33%	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data pengolahan hasil perikanan (Data)	4	499.862.985	-	-	1	1.645.000				1	1.645.000	25,00%	0,33%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	0,33%
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
					6.316.036.440	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							40,73%	32,22%			
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

#####

BAB. IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Dumai Semester Pertama Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai unsur Program Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung tujuan organisasi serta memberikan masukan dalam Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perikanan Kota Dumai dapat mencapai program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dengan baik. Capaian rata-rata pelaksanaan 4 program dan mencakup 11 kegiatan yang ditetapkan dengan realisasi keuangan Semester Pertama adalah sebesar 32,22 % tergolong dalam Sangat Rendah.

Capaian di atas menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kota Dumai turut berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan yang optimal untuk pengembangan perikanan.

Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan Kota Dumai berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Semester Pertama Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.